BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Penarikan Uang Pada Pedagang Kaki Lima Di Acara Pengajian Sabilu Taubah Di Kota dan Kabupaten Kediri

Dalam praktiknya sewa menyewa terdapat prinsip ataupun landasan yang perlu dijalankan dan merupakan pedoman dasar dalam menjalankan akad sewa menyewa yang benar. Sewa menyewa dalam hukum Islam berprinsip untuk selalu menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai yang ada di Al-Qur'an serta hadist Nabi, oleh karena itu apa yang diajarkan dan di anjurkan merupakan sesuai dengan syariat Islam yang baik dan benar. Apabila dalam melakukan transaksi sewa menyewa menerapkan apa yang sudah di anjurkan oleh Allah SWT maka akan mendapat banyak manfaat dan terhindar dari larangan Allah SWT.

Pada penelitian penarikan uang pedagang kaki lima ini obyek yang disewakan sudah jelas dan dapat dimanfaatkan, hal ini tentu diperbolehkan dalam hukum Islam untuk memberikan uang yang dikatakan upah (*ujrah*) atas tempat yang sudah dimanfaatkan. Hal yang melatarbelakangi penarikan uang pada pedagang kaki lima di sebuah acara yang diadakan oleh masyarakat Kota maupun Kabupaten Kediri ialah adat atau kebiasaan. Dengan tujuan hasil yang di dapat dari penarikan tersebut mampu menambah anggaran biaya acara agar dapat berjalan lancar.

Pada praktiknya besaran nominal yang dibayarkan oleh pedagang sangat bervariasi, hal itu dilihat dari panjang pendeknya tenda yang

digunakan. Selain dilihat dari panjang pendeknya tenda terdapat desa yang mengukur nominal sewa dengan menggambar kavling pada tempat yang disediakan, besaran nominal yang dibayar tergantung kavling yang digunakan pedagang untuk berjualan. Semakin banyak kavling yang digunakan, maka semakin mahal pedagang membayar sewa pada panitia acara. Dalam sistem kavling ini yang misalnya 1 kavling dengan harga Rp50.000 dan pedagang menggunakan 2 kavling, maka pedagang harus membayar Rp100.000 pada panitia acara. Dari kegiatan penarikan uang pada pedagang kaki lima tersebut, hasil yang didapat sepenuhnya akan dialokasikan anggaran biaya agar dapat menambah untuk kesuksesan dan kelancaran acara. Dalam praktiknya, penarikan uang terjadi pada sore hari atau sebelum dimulainya acara dengan cara pihak penyelenggara mendatangi para pedagang untuk menarik uang tersebut. Kemudian setelah uang diterima, panitia lalu memberikan selembar kertas dimana kertas tersebut tanda bahwa pedagang sudah membayar tempat yang sudah disediakan.⁷⁰

Namun terkait besaran nominal sewa yang yang diberikan pedagang kepada panitia acara tidak diketahui sebelumnya, besaran nominal tersebut ditentukan oleh panitia acara yang mana pedagang harus membayar dengan jumlah yang telah ditetapkan. Pedagang baru mengetahui nominal tepat di hari acara atau saat panitia mendatangi serta memberitahu besar nominal sewa yang harus dibayar. Hal itu yang membuat keresahan bagi para pedagang, karena berhubungan dengan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Mukmin, ketua panitia tanggal 21 September 2024

jumlah omzet yang didapat saat berjualan. Sedangkan fakta di lapangan tidak banyak pedagang yang mendapat keuntungan, dengan nominal tarif sewa yang ditetapkan oleh panitia membuat pedagang merasa keberatan.

Dari beberapa tempat pengajian yang sudah mengadakan acara pengajian Sabilu Taubah di Kota maupun Kabupaten Kediri, rata-rata para panitia menetapkan nominal sewa tempat yaitu Rp50.000,- untuk tenda panjang, Rp40.000 untuk tenda pendek serta Rp30.000,- untuk pedagang asongan. Namun pada penelitian ini terdapat 2 tempat yang memasang tarif sewa dalam jumlah yang besar, sehingga membuat pedagang mengalami kerugian. Tetapi dengan rata-rata penarikan dengan nominal diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa faktanya pedagang tetap mendapat omzet yang sedikit. Sehingga pedagang tidak mendapat keuntungan dalam jumlah yang besar, mengingat sebagian peroleh omzet juga digunakan untuk pengembalian modal dagang.

Dengan melihat hal itu, hingga saat ini masih banyak pedagang yang berjualan di acara pengajian Sabilu Taubah. Karena pedagang berfikir setiap kali berjualan bisa saja mendapat untung, sedangkan faktanya pedagang terus merasa rugi akibat nominal tarikan dan omzet yang di dapat. Maka dari itu sampai saat ini banyak pedagang yang mengikuti pengajian jika dekat dengan rumah saja, apabila undangan pengajian berada pada tempat yang jauh pedagang lebih memilih untuk tidak berjualan.

Berhubungan dengan penarikan uang sewa pada pedagang kaki lima diatas, yang semestinya semua hasil yang telah terkumpul diserahkan kepada pihak yang bertugas sesuai dengan rapat panitia terdapat penyalahgunaan atau ketidakberesan dalam menggunakan hasil sebagian iuran oleh panitia penarik. Penyalahgunaan yang dilakukan berbentuk pemanfaatan secara pribadi oleh panitia yang bertugas menarik uang tersebut, tentunya tanpa sepengetahuan pihak manapun khususnya pedagang maupun para anggota panitia lainnya. Di dalam rapat panitia memang tidak ada perjanjian yang jelas atau perjanjian tertulis untuk penyerahan uang hasil penarikan, hanya saja antara ketua atau anggota panitia lainnya saling mempercayai satu sama lain.⁷¹

Adat atau kebiasaan dalam mengadakan sebuah acara di Kota maupun Kabupaten Kediri seperti ini juga tidak adanya sistem upah, semua panitia bergotong royong untuk saling membantu demi kesuksesan acara yang diadakan. Pada saat rapat semuanya sudah dijelaskan bahwasannya setiap ada uang yang masuk wajib dikumpulkan kepada pihak yang sudah ditugaskan sesuai kesepakatan bersama, apabila anggaran acara tersebut mendapatkan sisa maka sisanya juga akan digunakan oleh semua tim panitia acara.⁷² Dengan menggunakan sistem penarikan yang dilakukan oleh panita terhadap pedagang, hal itu dapat menimbulkan kesenjangan dimana banyak pedagang yang memprotes tetapi tidak dapat mengubah nominal yang di tetapkan oleh pihak panitia.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Edi dan Bapak Siswanto, panitia penarik uang tanggal 21 dan 22 September 2024.

⁷² Wawancara Bapak Solikhin, ketua panitia tanggal 20 September 2024.

Panitia yang bertugas menarik uang tidak mempunyai wewenang untuk mengubah nominal penarikan, sebab hal itu sudah disepakati oleh seluruh panitia acara pada saat rapat.

Pada praktik penarikan uang yang terjadi pada pengajian Sabilu Taubah, masyarakat tidak begitu merespon akan sistem penarikan yang dilakukan oleh pihak panitia. Warga masyarakat sekitar merasa tidak mempunyai wewenang oleh peraturan yang sudah dibuat dan disepakati sebelumnya oleh pihak panitia.

Melihat hal tersebut, praktik penarikan uang pada pedagang kaki lima yang dilakukan oleh masyarakat Kota dan Kabupaten Kediri di acara pengajian Sabilu Taubah telah menyalahi atau melanggar aturan secara hukum Islam. Terdapat empat syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan transaksi sewa menyewa, namun pada penelitian ini dari keempat syarat tersebut hanya memenuhi dua diantaranya. Dari kedua syarat yang tidak terpenuhi yakni mengenai kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan kerelaan dan upah atau sewa dalam transaksi sewa menyewa harus jelas dan diketahui kedua belah pihak. Pada praktiknya dimana terdapat pemanfaatan secara sepihak oleh panitia penarik uang tanpa adanya perjanjian dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, juga tidak adanya kesepakatan antara penarik dengan pedagang sebelumnya terkait nominal sewa yang mengakibatkan cacatnya akad sewa menyewa tersebut. Meskipun di dalam hukum Islam terdapat aturan atau larangan yang mengatur sewa menyewa dengan cara yang salah atau *bathil*, namun bagi masyarakat kepentingan

ekonomi pribadi lebih mendominasi daripada kepentingan bersama atau ibadah.⁷³

Dalam penelitian ini pihak yang melakukan akad sewa menyewa dalam syarat sudah memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sebab keduanya sudah *baligh*. Selain itu keduanya juga telah memiliki kecakapan bertindak (*berakal*) dan beragama Islam, sehingga pihak yang melakukan akad dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Objek yang disewakan harus jelas dan memiliki manfaat serta dapat diserahkan.⁷⁴ Dalam hal ini tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia jelas dan dapat dimanfaatkan untuk berjualan oleh pedagang.

Akan tetapi permasalahan yang muncul yaitu terkait nominal sewa menyewa yang tidak diketahui sebelumnya oleh salah satu pelaku akad dan pengalokasian dana yang sudah terkumpul tidak diserahkan dengan jumlah nominal yang semestinya. Mereka menarik uang sewa tempat tepat di hari acara yang sebelumnya pedagang tidak mengetahui berapa tarif sewa tersebut. Para ulama sepakat bahwa *ujrah* (upah) harus berupa harta yang bernilai dan diketahui sebelum melakukan akad oleh pihak-pihak yang berakad. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan perselisihan yang dapat menyebabkan tidak sahnya akad tersebut. Dari segi konsep akad, syarat ini berkaitan dengan syarat sewa menyewa yaitu *mutsman* (barang yang disewakan) dan *tsaman* (harga) harus terhindar dari *gharar* yaitu keduanya harus diketahui oleh pihak yang melakukan akad. Karena *ujrah*

⁷³ Umi Hani, *Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, 2021), 61.

⁷⁴ Ahmad Sarwar, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 10-11.

dalam akad *ijārah* berkedudukan sebagai harga (*tsaman*) dan manfaatnya berkedudukan sebagai *mutsmān* maka manfaat *ujrah* harus terhindar *gharar* pula, keduanya harus diketahui oleh *mu'ajir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa/penyewa) pada saat akad *ijārah* dilakukan.⁷⁵

Hal tersebut menjadikan akad sewa menyewa tempat berdagang saat acara pengajian Sabilu Taubah tidak sah. Karena di dalam akad mengandung rasa ketidakrelaan dari salah satu pelaku akad yang timbul akibat tidak disebutkan dengan jelas mengenai nominal sewa sebelum melakukan akad. Serta di dalam sewa menyewa tersebut mengandung unsur paksaan, apabila pihak pedagang tidak mampu membayar sewa yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak panitia maka pedagang tidak dapat berjualan di acara pengajian tersebut.⁷⁶

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penarikan Uang Pada Pedagang Kaki Lima Di Kota Dan Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil temuan yang telah dilakukan peneliti di lapangan terhadap penarikan uang pada pedagang kaki lima di acara pengajian Sabilu Taubah, hal yang melatarbelakangi kegiatan tersebut adalah adat atau kebiasaan masyarakat setempat apabila mengadakan sebuah acara. Setelah adanya rapat panitia acara, hasil yang terkumpul dari penarikan tersebut diserahkan kepada panitia yang bertugas guna dialokasikan untuk tambahan biaya acara yang telah diselenggarakan. Tetapi pada saat

⁷⁵ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 22.

⁷⁶ Ali Ridlo, 'Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam', Vol. VI No. 2 (2021).

melakukan penarikan uang, sebelumnya tidak ada perjanjian nominal terlebih dahulu antara pedagang dengan panitia penarik uang. Penarikan tersebut terjadi secara tiba-tiba, dimana tepat di hari acara pedagang langsung menempatkan dagangannya pada tempat yang sudah disediakan oleh panitia acara. Setelah itu sore hari atau sebelum acara dimulai, panitia yang ditugaskan untuk mengkoordinasi pedagang mendatangi dan menarik uang sewa tempat tersebut dan memberikan selembar kertas sebagai tanda bukti.

Namun di dalam transaksi sewa menyewa tempat berdagang pada acara pengajian Sabilu Taubah, terdapat penyalahgunaan oleh pihak panitia yang bertugas menarik uang tersebut. Dimana yang seharusnya uang hasil penarikan telah terkumpul akan diserahkan pihak yang ditugaskan seperti yang sudah dirapatkan sebelumnya, akan tetapi pihaknya menyisihkan sebagian hasil tersebut untuk digunakan secara pribadi tanpa ada pihak lain yang mengetahui. Bentuk pemanfaatan pribadi yang dilakukan sekedar untuk membeli makanan, rokok, atau kopi. Memang tidak ada perjanjian tertulis untuk penyerahan hasil penarikan tersebut, semua pihak panitia saling mempercayai saja antara satu sama lain. Sebab itu panitia penarik uang mengesampingkan kesepakatan bersama dan mengambil sebagian hasil penarikan demi mendapat keuntungan pribadi.

Larangan memakan sebagian harta dari orang lain yang bukan haknya di sebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:

تَرَا عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ ضٍ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”⁷⁷

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 29 diatas dapat dipahami bahwasannya, Allah telah memberi batasan manusia dalam melakukan transaksi muamalah. Memakan atau mengambil harta yang bukan hak miliknya merupakan transaksi yang *bathil*, karena mengandung unsur yang dapat merugikan dari salah satu pihak. Dalam hal ini, transaksi muamalah seperti ini bertentangan dengan syariat Islam yang artinya tidaklah sah akadnya.⁷⁸

Mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi merupakan hal yang penting dalam sosiologi hukum Islam karena mencakup konsep keadilan, kejujuran dan tanggung jawab sosial. Tetapi pada penelitian ini hakikatnya bahwa hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai entitas yang bebas dari segala pengaruh lingkungan sosial, utamanya karena peran sejarah sosial terhadap hukum Islam. Sehingga hukum Islam tidak lagi dilihat atau menjadi pedoman, semata hanya berbicara halal dan haram saja dengan mengesampingkan dampak atau pengaruh sosial masyarakatnya dimana hukum Islam itu tumbuh dan berkembang. Maka seharusnya dalam mengatasi permasalahan sosial di

⁷⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), 28.

⁷⁸ Hutrin Kamil Arifatulfajrin, Siti Nurhayati, ‘*Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti Di Pasar Grosir Buah Dan Sayur Ngronggo Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam*’, *Qawanin Journal Of Economic Syaria Law*, Vol.7 No.2 (2023), 119-120.

masyarakat, harus berpedoman kepada hukum Islam tetapi tetap dengan memegang aturan-aturan yang tidak boleh menyalahi dari unsur *syara*'.

Sosiologi hukum Islam merupakan salah satu ilmu yang menjelaskan hukum Islam dengan interaksi timbal balik dalam masyarakat dan bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi perubahan masyarakat. Pada dasarnya para peneliti mengkaji hukum Islam harus turun ke dalam kehidupan nyata masyarakat muslim untuk membangun pemahaman yang benar-benar valid. Selain itu pengaruh peran masyarakat yang dipercaya mampu mengambil tempat yang tepat agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera sesuai aturan-aturan dalam hukum Islam, sehingga disinilah kajian hukum Islam dengan pendekatan sosiologi sangat diperlukan. Di dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam agar dapat menjadi patokan atau pegangan supaya tidak menyalahi aturan-aturan yang ada hanya karena kurang masyarakat memahami mengenai hukum Islam.⁷⁹

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggali suatu peristiwa praktik penarikan uang pada pedagang kaki lima dengan menggunakan salah satu teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber yaitu teori tindakan rasionalitas instrumental (*Zwerk Rational*). Dalam pengertiannya teori tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang

⁷⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 1996). 132.

dipergunakan untuk mencapainya.⁸⁰ Bentuk dari tindakan itu sendiri ialah dimana seorang panitia penarik ingin mendapat keuntungan dari hasil penarikan tersebut, maka timbul tindakan kecurangan atas hasil yang telah terkumpul tersebut oleh panitia yang bertugas untuk digunakan secara pribadi. Tindakan itu telah dilakukan dengan sadar dan dipertimbangkan dengan matang, agar ia dapat mencapai tujuan yang dilakukan. Selain itu penelitian ini juga mengkaji berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam, hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum Islam dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak penarik uang. Maka peneliti menggunakan teori M. Atho' Mudzhar, beliau mengatakan bahwa studi Islam dapat mengambil, setidaknya lima tema:⁸¹

1. Pengaruh hukum Islam terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Pada bagian ini, studi Islam mencoba mempelajari bagaimana nilai-nilai agama mempengaruhi dinamika sosial. Sebagai contoh seperti apa masyarakat dalam menilai agama yang membawa perubahan pada kehidupan sosial. Berdasarkan wawancara dengan pihak panitia penarik uang, pihak tersebut hanya mengetahui bahwa yang diperbuat tidak benar secara hukum Islam. Namun nilai agama yang secara dalam serta dampak dari segi hukum Islam belum diketahui, maka pihak penarik tetap melakukan perbuatannya tanpa adanya pertimbangan. Dengan demikian pengaruh hukum Islam dalam membawa perubahan pada masyarakat belum begitu signifikan, sehingga masyarakat terus melakukan perbuatan yang menyalahi

⁸⁰ Max Weber, *The Sociology of Religion*, (Amerika Serikat: Beacon, 1964), 177.

⁸¹ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 16.

aturan secara hukum Islam.

2. Perubahan di masyarakat terhadap pemahaman tentang hukum Islam atau konsep keagamaan.

Pada bagian studi ini, studi Islam mencoba meneliti bagaimana struktur masyarakat membentuk pemahaman terhadap ajaran agama. Sebagai contoh dalam praktik penarikan uang pada pedagang kaki lima, pengaruh tokoh agama dalam memberikatan pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum sewa menyewa belum berperan aktif. Dengan demikian, minimnya sosialisasi atau peran tokoh agama di Kota maupun Kabupaten Kediri menjadikan masyarakat tetap melakukan transaksi sewa menyewa yang dilanggar secara hukum Islam hingga saat ini.

3. Tingkat pengalaman hukum beragama masyarakat.

Pada pembahasan studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengevaluasi pola penyebaran agama Islam dan seberapa jauh ajaran agama Islam itu diamalkan oleh masyarakat.⁸² Dalam praktik penarikan uang pada pedagang kaki lima yang terjadi pada pengajian Sabilu Taubah, pihak penarik uang yang melakukan tindakan kecurangan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tidak benar. Namun tingkat kesadaran atau pengalaman hukum beragama masih sangat kecil. Dengan demikian, pihaknya tetap melakukan tanpa adanya pertimbangan atau tanpa memikirkan dampak yang terjadi secara hukum beragama.

⁸² *Ibid*, 17.

4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.

Pola interaksi dalam masyarakat mengenai hukum Islam, seperti masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa. Pola hubungan antar agama di masyarakat, perilaku toleransi antar masyarakat muslim, hubungan tentang pemahaman agama dengan perilaku politik. Dalam praktik penarikan uang pada pengajian Sabilu Taubah, bagaimana kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon pada persoalan penarikan uang pedagang kaki lima khususnya saat acara pengajian Sabilu Taubah.

5. Gerakan yang membawa pemahaman masyarakat yang dapat melemahkan atau menjunjung kehidupan beragama.

Pada studi ini menjelaskan bahwa kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan suatu contoh gerakan yang mengancam kehidupan beragama.⁸³ Berkenaan dengan hal tersebut munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme dapat menunjang perbaikan kehidupan beragama. Dalam hal ini praktik penarikan uang pada pedagang kaki lima di acara pengajian Sabilu Taubah, maka dapat dianalisa bahwa organisasi kemasyarakatan belum bisa mempengaruhi kegiatan yang berkesinambungan untuk membangun pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam khususnya tidak mengambil harta yang seharusnya bukan dimilikinya.

Dapat disimpulkan bahwa kelima teori yang dikemukakan oleh

⁸³ M Rasyid Ridla, 'Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)', *Ahkam*, 7 (2012), 297.

M.Atho' Mudzhar diatas untuk menentukan bagaimana sosiologi hukum Islam mempengaruhi perkembangan hukum pada masyarakat khususnya mengenai penarikan uang pada pedagang kaki lima.

Pada zaman sekarang masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai permasalahan keagamaan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, situasi, kondisi di suatu masyarakat itu berada. Dengan mengatas namakan keuntungan, kebutuhan ekonomi lebih mendominasi daripada ibadah atau permasalahan yang berkesinambungan dengan keagamaan dikesampingkan oleh masyarakat. Selain itu kurangnya pemahaman dari masyarakat sendiri atau dukungan dari tokoh masyarakat sebagai panutan yang kurang turut andil dalam mengambil peran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Praktik penarikan uang pada pedagang kaki lima apabila mengadakan sebuah acara di desa sudah menjadi kebiasaan turun menurun di dalam masyarakat. Namun apabila menarik uang sewa tempat tersebut tidak adanya perjanjian nominal terlebih dahulu yang menimbulkan tidak kerelaan dari salah satu pihak atau sewa menyewa yang dapat merugikan salah satu pihak, sewa menyewa tersebut menjadi tidak sah dikarenakan bertentangan dengan syari'at Islam. Kebiasaan tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor pendorong seperti kebiasaan tersebut sudah ada sejak dahulu, tuntutan ekonomi, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam dan kurangnya peran tokoh masyarakat di dalamnya.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam penerapan hukum Islam. Selain itu dapat dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.⁸⁴

Dalam suatu kejadian di masyarakat pasti akan selalu muncul timbal balik antara satu individu dengan individu yang lain, yakni baik pedagang maupun panitia acara. Interaksi yang terjadi antara pedagang dengan panitia penarik uang adalah bentuk transaksi sewa menyewa. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial asosiatif dengan bentuk kerja sama (cooperation). Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kerja sama adalah proses apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan atau saling membutuhkan satu sama lain dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut.⁸⁵ Hal ini sesuai dengan tujuan pedagang serta panitia acara dalam melakukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan antara kedua belah pihak. Dalam hubungan timbal balik antara pedagang dengan panitia acara keduanya saling mengetahui dan bertatap muka langsung serta bertransaksi ditempat. Alasan seluruh panitia acara menarik uang ke pedagang kaki lima ialah hasil tersebut dapat menambah biaya acara yang seharusnya semua hasil dialokasikan ke acara. Namun di dalamnya terdapat penyalahgunaan sebagian hasil penarikan tersebut oleh pihak panitia yang bertugas

⁸⁴ M. Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Ahkam Vol.2 No.12, h.297-298.

⁸⁵ Dwi Asrini, *'Sosiologi Suatu Pengantar'* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 7.

mengkoordinasi pedagang untuk digunakan secara pribadi. Tidak ada alasan yang jelas, hanya saja pihaknya ingin menyisihkan uang tersebut untuk digunakan sendiri. Kemudian saat penarikan tersebut terjadi, pihak panitia membawa selebaran kertas untuk diserahkan ke pedagang yakni bukti bahwa pedagang tersebut sudah membayar sewa tempat dan diperbolehkan untuk berdagang. Namun apabila pihak pedagang tidak dapat membayar sewa tempat tersebut, maka pedagang tidak diperbolehkan berdagang di sekitar area acara.

Oleh karena itu adanya faktor-faktor pendorong yang menjadi penyebab kebiasaan masyarakat, perilaku masyarakat, maupun timbal balik antara pedagang dengan pihak panitia acara sehingga menjadikan kaidah-kaidah keagamaan yang dikesampingkan oleh masyarakat. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pengalaman terhadap hukum Islam oleh pihak panitia acara yang bertugas menarik uang masih rendah dan lebih mementingkan keuntungan.